SKRIPSI

KEABSAHAN PERJANJIAN PADA APLIAKSI SPINJAM SHOPEE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh:

RESA AMELIA

NIM 22.10.008

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: RESA AMELIA
Npm	: 22.10.0008
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL	: **"Keabsahan Perjanjian Pada Aplikasi Spinjam Shopee ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"**

Palembang, Juli 2026

Menyetujui,

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Erniwati S.H.,M.Hum	**Hj. Suryani Yusi S.H.,M.Hum**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Iba Palembang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Erniwati S.H.,M.Hum

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Resa Amelia
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 11 Juni 2004
NPM	: 22.10.0008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk menjadikan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun diperguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pernyataan diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 11 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Resa Amelia
(22.10.0008)

ABSTRAK

Keabsahan Perjanjian Pada Aplikasi
Spinjam Shopee Ditinjau Dari Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai layanan keuangan digital (*financial technology*), salah satunya layanan pinjaman online SPinjam Shopee. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan dan pengguna diwujudkan melalui perjanjian elektronik yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian pada aplikasi SPinjam Shopee ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta mengetahui akibat hukum apabila syarat sah perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik pada layanan SPinjam Shopee pada dasarnya telah memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) yang menerapkan mekanisme *take it or leave it* masih menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan kedudukan para pihak serta tingkat pemahaman pengguna terhadap isi perjanjian. Akibat hukum apabila syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan tidak terpenuhi adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan apabila syarat objektif berupa suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Oleh karena itu, meskipun secara normatif perjanjian SPinjam Shopee telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, peningkatan transparansi informasi serta perlindungan hukum terhadap pengguna tetap diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, SPinjam Shopee, Perjanjian Elektronik, Pasal 1320 KUHPerdata, Fintech.

ABSTRACT

The validity of the agreement
on the Shopee Spinjam application is reviewed
from Article 1320 of the Civil Code.

The rapid development of information technology has encouraged the emergence of various digital financial services (financial technology), one of which is the SPinjam Shopee online lending service. The legal relationship between the service provider and its users is established through an electronic agreement, which must fulfill the legal requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This study aims to analyze the validity of agreements in the SPinjam Shopee application based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code and to examine the legal consequences arising when the legal requirements for a valid agreement are not fulfilled. This research employs a normative juridical method using the statutory approach and the case approach. The data used consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the electronic agreement used in the SPinjam Shopee service has, in principle, fulfilled the four legal requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely mutual consent, legal capacity, a certain subject matter, and a lawful cause. Nevertheless, the use of standard form contracts applying the take-it-or-leave-it mechanism still raises issues regarding the imbalance of bargaining positions between the parties and users' understanding of the contractual terms. Failure to fulfill the subjective requirements, namely mutual consent and legal capacity, renders the agreement voidable (vernietigbaar), whereas failure to fulfill the objective requirements, namely a certain subject matter and a lawful cause, renders the agreement null and void (nietig van rechtswege). Therefore, although the SPinjam Shopee agreement has normatively complied with the provisions of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, greater transparency and stronger legal protection for users remain necessary to ensure legal certainty, justice, and a fair balance of rights and obligations between the parties.

Keywords: *Validity of Agreements, SPinjam Shopee, Electronic Agreements, Article 1320 of the Indonesian Civil Code, Financial Technology (FinTech).*